

Pengaruh PDRB Perkapita dan Jumlah Polisi Terhadap Tindak Kriminal Terlapor di 7 Kota Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat Tahun 2014-2016

The Effect of GRDP Per Capita and Number of Police on Criminal Reported Act in 7 Cities in The West Java Regional Police 2014-2016

¹Ceacilia Utami Ciptady Putri ²Ria Haryatiningsih ³Meidy Haviz

¹*Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹ceaciliautami@gmail.com ²riaharyatiningsih@gmail.com ³meidyhaviz@gmail.com

Abstract. City is an area that provides services for the people who live in it. One of the services provided is service in terms of security. City security indicators are reflected in the number of criminal acts reported by. The existence of a crime in the city will cause social costs incurred by the aggrieved party. One of the factors that influence crime is a lack of income for someone to fulfill their needs, other than that there are stakeholder factors in criminal acts which are reflected by the police who function to maintain public order and security. This study aims to determine how much influence the GRDP per capita and the number of police on the crime reported act. In this study the data was processed using panel data regression method consisting of 7 cities in the area of West Java Police during the period 2014-2016, with using Random Effect Model from the result of the Hausman Test. The regression results indicate that GRDP per capita does not affect the crime reported act and the number of police has a positive effect on the crime reported act.

Keywords: Crime Reported Act, GRDP per capita, Police.

Abstrak. Kota merupakan sebuah kawasan yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal didalamnya. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah pelayanan dari segi keamanan. Indikator keamanan kota tercermin dari jumlah tindak kriminal terlapor. Adanya tindak kriminal di kota akan menimbulkan biaya sosial yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tindak kriminal adalah kurangnya pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu ada faktor pemangku kepentingan tindak kriminal yang dicerminkan oleh aparat kepolisian yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB perkapita dan jumlah polisi terhadap tindak kriminal terlapor. Dalam penelitian ini data diolah menggunakan metode regresi data panel yang terdiri dari 7 kota di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat selama kurun waktu 2014-2016, dengan hasil Hausman Test menggunakan Random Effect Model. Hasil regresi menunjukkan bahwa PDRB perkapita tidak berpengaruh terhadap tindak kriminal terlapor dan jumlah polisi memiliki pengaruh positif terhadap tindak kriminal terlapor.

Kata Kunci: Tindak Kriminal Terlapor, PDRB Perkapita, Polisi

A. Pendahuluan

Kota merupakan kawasan maju yang memiliki fasilitas untuk keperluan warga yang tinggal didalamnya, selain itu kota juga merupakan kawasan yang memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat yang tinggal didalamnya. Selain itu kota juga merupakan kawasan dimana penduduknya melakukan banyak aktivitas.

Kota yang ideal merupakan kota yang memberikan fasilitas keamanan bagi penduduk yang ada didalamnya. Indikator keamanan kota dapat tercermin dari jumlah tindak kriminal terlapornya. Tindak kriminal terlapor adalah peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada kepolisian, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Tindak kriminal yang tinggi akan menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepercayaan masyarakat akan keamanan kota akan semakin berkurang dan berakibat pada perkembangan kota, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang akan menurun, serta bertambahnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Penyebab terjadinya kejahatan yang paling menonjol adalah karena faktor ekonomi. Kebutuhan hidup seseorang tidak lepas dari kebutuhan ekonomi yang harus selalu dicukupi agar dapat bertahan hidup. Zaman yang serba modern dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk memperkaya dengan melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (Syafik, 2018). Kebutuhan hidup masyarakat sebuah kota dapat tercermin dari PDRB perkapita kota tersebut.

Selain itu besar kecilnya jumlah tindak kriminal terlapor di sebuah kota akan ditentukan oleh seberapa sigap pihak yang berwenang dalam

menyelesaikan masalah tersebut bertindak. Dalam hal ini pihak kepolisian merupakan pemangku kepentingan dalam mengatasi tindak kriminal.

Kepolisian Daerah Jawa Barat merupakan kepolisian yang memiliki tindak kriminal terlapor terbesar ketiga di seluruh Indonesia pada tahun 2016 (BPS, 2017). Hal tersebut terjadi karena kebanyakan dari kota di wilayah Polda Jabar merupakan daerah urban dan metropolitan, sehingga besarnya wilayah perkotaan dan banyaknya jumlah penduduk, akan membuat pihak yang berwajib kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangani masalah kejahatan (O'Sullivan, 2003).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap tindak kriminal terlapor di kota wilayah Polda Jabar?
2. Bagaimana pengaruh jumlah polisi terhadap tindak kriminal terlapor di kota wilayah Polda Jabar?

Maka, tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh PDRB perkapita terhadap tindak kriminal terlapor di kota wilayah Polda Jabar; dan (2) untuk mengetahui pengaruh jumlah polisi terhadap tindak kriminal terlapor di kota wilayah Polda Jabar.

B. Landasan Teori

Perkotaan adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial, yang dijabarkan dalam 10 kriteria yang lebih spesifik untuk merumuskan kota (Laksmana, 2014). Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan jumlah penduduk

- yang besar terhadap massa dan tempat
2. Bersifat permanen
 3. Kepadatan minimum terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah
 4. Struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan jalur jalan dan ruang perkotaan yang nyata
 5. Tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja
 6. Fungsi perkotaan minimum meliputi pasar, pusat administrasi atau pemerintahan, pusat militer, pusat keagamaan, atau pusat aktivitas intelektual
 7. Heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hirarki pada masyarakat
 8. Pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian ditepi kota dan memeroses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas
 9. Pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat
 10. Pusat penyebaran

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan (Ritonga, 2011).

Menurut Ammar (2015) Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda, lalu ditingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga dengan Polres.

Menurut Pratiwi (2014), kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Sedangkan tindak kriminal terlapor adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian (BPS, 2017).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah hasil estimasi model tindak kriminal terlapor, yang diuji menggunakan teknis regresi data panel pada *Eviews 7.2*. Hasil estimasi dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Estimasi

Variabel	Koefisien	t-stat	Prob
C	-48.36812	-0.135282	0.8939
PDRB Perkapita	-13.57550	-1.104267	0.2840
Jumlah Polisi	1.352847	5.248137	0.0001
Koefisien Determinasi (R ²)	0.677231		
F-statistic	18.88376		
Prob (F-statistic)	0.000038		

Sumber: Data Penelitian, diolah 2019

Tabel 1 menunjukkan hasil estimasi model persamaan tindak kriminal terlapor pada 7 kota di wilayah Polda Jabar, yang terdiri dari dua variabel bebas yaitu PDRB perkapita

dan jumlah polisi. Secara matematis model persamaan untuk keseluruhan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{TKT} = -48.36812 - 13.57550 \text{ PP} + 1.352847 \text{ JP}$$

Dimana TKT adalah Tindak Kriminal Terlapor, PP adalah PDRB perkapita, dan JP adalah jumlah polisi. Sedangkan untuk nilai *effect* masing-masing kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Panel *Effect* Pada Kota-Kota Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat

Kota	<i>Effect</i>
Bandung	-42.11598
Sukabumi	682.3916
Bogor	31.53932
Cirebon	229.7018
Cimahi	-515.7459
Tasikmalaya	-272.6844
Banjar	-113.0863

Sumber: Hasil Estimasi, diolah 2019

Nilai -48.36812 merupakan konstanta bersama (*common intercept*) untuk 7 kota di wilayah Polda Jabar. Sedangkan *effect* untuk setiap kota adalah yang tertera pada Tabel 2. *Effect* tersebut merupakan nilai pembeda bagi intersep pada setiap kota.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah koefisien yang menghitung seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Adapun hasil dari koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah 0.677231 atau 68 persen. Artinya 68 persen variasi pada tindak kriminal terlapor dapat dijelaskan oleh variabel PDRB perkapita dan variabel jumlah polisi, sementara sisanya sebesar 32 persen ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

Uji T (Uji Parsial)

Variabel	t-Stat	t-tabel	H_0	Ket.
PDRB Perkapita	-1.104267	2.02269	H_0 diterima	$\alpha = 0.05$
Jumlah Polisi	5.248137	2.02269	H_0 ditolak	$\alpha = 0.05$

Sumber: Hasil Estimasi, diolah 2019

Nilai t-statistik untuk variabel PDRB perkapita adalah sebesar -1,104267, dengan tingkat $\alpha = 5$ persen dan t-tabel sebesar 2,0226. Sehingga t-stat < t-tabel, hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya pada tingkat signifikansi 95 persen variabel PDRB perkapita tidak berpengaruh terhadap tindak kriminal terlapor di 7 kota wilayah Polda Jabar.

Nilai t-statistik untuk variabel jumlah polisi adalah sebesar 5,248137, dengan tingkat $\alpha = 5$ persen dan t-tabel sebesar 2,0226. Sehingga t-stat > t-tabel, hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang artinya pada tingkat signifikansi 95 jumlah polisi berpengaruh terhadap tindak kriminal terlapor di 7 kota wilayah Polda Jabar.

Uji F (Uji Keseluruhan)

Berdasarkan uji-F, diperoleh nilai F-statistik adalah sebesar 18,88376 dengan nilai F-tabel pada tingkat $\alpha = 5$ persen sebesar 4,09 sehingga F-stat > F-tabel. Hal ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95 persen PDRB perkapita dan jumlah polisi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap tindak kriminal terlapor di 7 kota wilayah Polda Jabar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Selama kurun waktu 2014-2016, menunjukkan bahwa PDRB perkapita tidak berpengaruh terhadap tindak kriminal terlapor pada tingkat signifikansi 95 persen, hubungan negatif antara PDRB perkapita dan tindak kriminal terlapor mengindikasikan bahwa setiap peningkatan PDRB Perkapita sebesar 1 juta Rupiah *ceteris paribus* maka tindak kriminal terlapor akan menurun sebanyak 14 kejadian. Hal tersebut berarti apabila pendapatan yang diperoleh masyarakat menurun akan mengakibatkan dorongan untuk melakukan tindak kriminal sebagai cara memenuhi biaya kebutuhan hidupnya, sebaliknya apabila pendapatan yang diperoleh masyarakat meningkat akan membuat masyarakat lebih waspada terhadap tindak kejahatan karena dapat memiliki sistem keamanan mandiri yang lebih baik.
2. Sementara jumlah polisi berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas pada tingkat signifikansi 0.0001 yang artinya setiap penambahan jumlah polisi sebanyak 1 orang personil *ceteris paribus* maka tindak kriminal terlapor akan bertambah sebanyak 1 kejadian. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan semakin bertambahnya aparat kepolisian, semakin besar kemampuan polisi untuk melayani masyarakat dan keyakinan masyarakat terhadap kepolisian akan bertambah. Keyakinan masyarakat terhadap

polisi ini akan membuat masyarakat terdorong untuk melaporkan tindak kriminal yang dialami dan yang terjadi disekitarnya. Hal tersebut akan membuat tindak kriminal di sebuah kota menjadi lebih terkendali karena bantuan dari pihak kepolisian.

E. Saran

1. Untuk kepentingan praktis, dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa PDRB Perkapita memiliki pengaruh negatif pada tingkat kriminalitas. Maka, PDRB Perkapita perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki biaya lebih untuk meningkatkan sistem keamanan yang ada di sekitar mereka. Penyediaan sarana dan prasarana dalam bidang keamanan pun perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan penambahan kuantitas polisi sesuai dengan jumlah penduduk agar setiap personil kepolisian dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena penambahan jumlah polisi yang melebihi rasio yang ideal belum tentu dapat menurunkan angka kriminalitas dan hanya akan membuat pengeluaran pemerintah untuk biaya keamanan menjadi lebih besar. Kepedulian sosial masyarakat pun perlu di tingkatkan sehingga masyarakat dapat menjaga keamanan lingkungan yang bersifat mandiri.
2. Untuk kepentingan akademik, penelitian ini masih menggunakan data sekunder untuk masing-masing kota. Oleh karena itu, Penulis menyarankan agar penelitian serupa

selanjutnya dapat melakukan survey ke setiap wilayah sehingga memiliki data yang lebih akurat untuk masing-masing variabel. Penulis juga menyarankan untuk fokus melakukan penelitian di sebuah wilayah tertentu (contoh: sebuah kota), sehingga analisis yang diperoleh menjadi lebih spesifik terhadap faktor apa saja yang menjadi pemicu tindak kriminal di wilayah tersebut.

Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. *Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Begal dan Upaya Penanggulangannya di Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Daftar Pustaka

- Ammar, Mukhtaruddin. 2015. Universitas Lampung, Bandar Lampung. *Evektivitas Patroli Yang Dilakukan Polisi Dalam Mencegah Tindak Pidana Selama Tahun 2014 (Studi Kasus Polsek Kedaton).*
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Kriminal 2017.* Jakarta.
- Gujarati, D.N. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2 Edisi 5.* Terjemahan Mangunsong, R.C. Jakarta: Salemba Empat.
- Laksmana, Anda. 2014. Universitas Lampung, Bandar Lampung. *Analisa Kinerja Pembangunan Wilayah dan Pergeseran Perekonomian Kota Bandar Lampung.*
- O'Sullivan, Arthur. 2003. *Urban Economics 5th Edition.*
- Pratiwi, Nurul Nanda. 2014. Universitas Lampung, Bandar Lampung. *Kajian Sosiologis Bentuk-Bentuk Kriminalitas di Angkutan Umum (Studi Pada Korban Tindak Kriminalitas di Angkutan Umum Daerah Bandar Lampung).*
- Ritonga, Taufik. 2011. Universitas Sumatera Utara, Medan. *Peramalan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padangsidempuan Tahun 2012.*
- Syafik, Muhammad. 2018. Universitas